

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa komponen krusial dalam inisiatif pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Desa memiliki peran yang sangat signifikan karena merupakan entitas terkecil di hierarki pemerintahan dan memiliki banyak potensi untuk perkembangan. Selain itu, kemajuan yang terjadi di desa dianggap sangat penting sebagai fondasi untuk mencapai pembangunan nasional yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa memiliki peran yang sangat signifikan karena merupakan bagian terkecil dari hierarki pemerintahan dan memiliki potensi yang luar biasa untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, kemajuan yang terjadi di desa dianggap sangat penting sebagai fondasi untuk mencapai pembangunan nasional yang lebih luas (Mega Evia Lestari & Cita Ayu, 2021) .

Untuk memperkuat niat tersebut, pemerintah memperkenalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk desa, yang merupakan langkah menyeluruh dalam meningkatkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, serta manajemen komunitas tingkat desa. SDGs desa merupakan adaptasi dari 17 tujuan pembangunan global yang diubah menjadi 18 tujuan yang sesuai dengan konteks dan juga kebutuhan yang ada di desa-desa di Indonesia (Sitti et al., 2021),

sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berbagai tujuan tersebut mencakup Desa yang terbebas dari kemiskinan dan juga kelaparan, sehat dan makmur, Pendidikan yang bermutu, Keterlibatan perempuan, akses terhadap air bersih, sarana sanitasi yang layak, memanfaatkan energi bersih terbarukan, Pertumbuhan ekonomi yang merata, Infrastruktur dan inovasi yang memenuhi kebutuhan, tanpa ketimpangan, Lingkungan pemukiman yang aman serta nyaman, Pola konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan, peka terhadap dampak perubahan iklim, peduli terhadap ekosistem laut, perhatian terhadap ekosistem darat, damai dan adil, Kolaborasi dalam pembangunan, serta Kelembagaan yang progresif dan budaya yang mampu beradaptasi (Aryani & Nurhazana, 2024).

Melalui SDGs Desa, pemerintah bertekad untuk memfasilitasi pengembangan yang lebih terbuka, melibatkan masyarakat, dan berorientasi pada masa depan. Selain itu juga pemerintah berupaya untuk mewujudkan desa yang terbebas dari kemiskinan serta kelaparan, desa dengan distribusi ekonomi yang adil, desa yang memprioritaskan kesehatan, desa dengan akses pendidikan yang baik, desa yang peduli terhadap lingkungan, dan desa yang menghargai budaya serta kearifan lokal. Sasaran-sasaran ini juga sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang menegaskan SDGs sebagai pedoman strategis untuk pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, visi Indonesia Emas yang diuraikan pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menekankan pada aspek keberlanjutan dan pemerataan

sebagai dasar utama dalam mencapai tujuan pembangunan (Nurhayati et al., 2025).

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, Indonesia saat ini memasuki fase pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai dasar utama dalam visi Asta Cita Presiden untuk mencapai “Indonesia Emas 2045”. Visi ini menyoroti signifikansi penggabungan antara pemerataan ekonomi dan ketahanan lingkungan sebagai dua pilar utama dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang diintegrasikan dengan bijak dalam RPJMN 2025 - 2029, termasuk melalui misi keenam Asta Cita yang menekankan pertumbuhan dari lapisan masyarakat dan dari dasar. Berbagai program utama, seperti program MBG teruntuk anak-anak dan ibu hamil, diarahkan untuk mengatasi masalah kemiskinan, stunting, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia. Selain itu, kebijakan pembangunan juga ditujukan pada pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peralihan menuju energi ramah lingkungan dan ketahanan pangan. Dengan demikian, desa semakin diposisikan sebagai pusat strategis dalam mencapai SDGs nasional melalui mengembangkan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta juga meningkatkan ketahanan lingkungan (Nurhayati et al., 2025).

Melalui adanya *Sustainable Development Goals (SDGs) Desa*, SDGs desa berguna sebagai alat perencanaan, sert menjadi tolok ukur suksesnya perkembangan desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. karena itu, pencapaian SDGs desa sangat ditentukan oleh mutu pengelolaan dan prinsip-

prinsip yang terdapat dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan program, sampai dengan fase pelaporan dan evaluasi. Etika profesionalisme perangkat desa dalam mengelola program, serta partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjamin bahwa setiap tahap pembangunan berlangsung dengan transparansi dan tanggung jawab (Sayuti et al., 2022). Pencapaian SDGs di tingkat desa tidak hanya terikat dengan aspek teknik dan kewangan, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral serta etika yang dimiliki para pembuat keputusan .

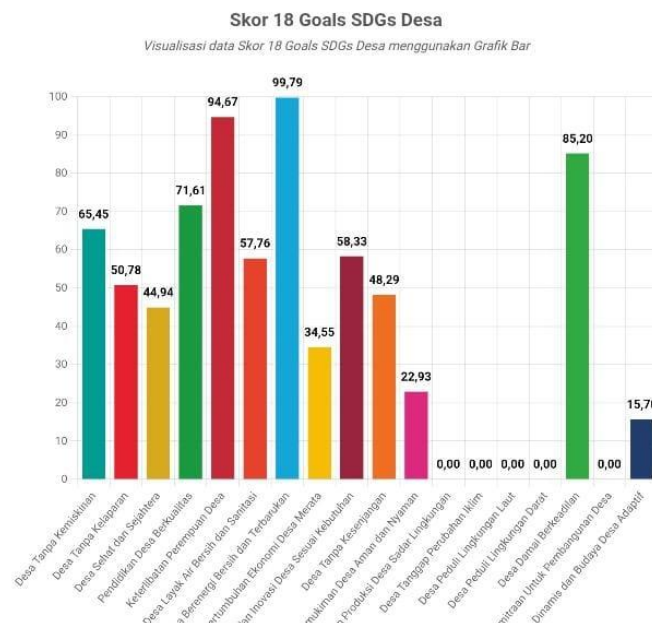
Moral *sensitivity* atau sensitivitas moral berfungsi sebagai dasar penting bagi pegawai desa dalam menentukan tindakan mana yang etis dan mana tidak etis selama pelaksanaan tugas pemerintahan dan pengembangan desa. Pegawai desa yang memiliki kemampuan moral yang baik cenderung mematuhi peraturan dan menjauh dari praktik menyimpang demi keuntungan pribadi atau untuk kelompok tertentu. Di sisi lain, kurangnya sensitivitas moral dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan, menurunnya integritas, serta pengambilan keputusan yang tidak berfokus pada kepentingan rakyat (Aulia et al., 2023). Kondisi ini bisa menyebabkan ketidaksetaraan dalam pembagian manfaat pembangunan desa serta menghalangi tercapainya sasaran pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini termasuk dalam usaha mencapai SDGs desa yang menekankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan (F. A. Putri & Khansa, 2025).

Selain moral *sensitivity*, keterbukaan menjadi dasar penting dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. Pemerintah juga perlu menerapkan prinsip keterbukaan agar masyarakat bisa mengakses informasi yang seharusnya mereka

terima, termasuk mengenai pelaksanaan, kebijakan, pengelolaan, serta hasil yang telah diraih (Kartika Sari & Widyawati, 2021). Penerapan prinsip keterbukaan memberikan kesempatan kepada warga untuk memahami dan memantau proses pemerintahan di tingkat desa, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, kurangnya keterbukaan dapat menciptakan ketidakselarasan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik serta menghalangi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa (Widya & Lestari, 2025).

Disisi lain, (Samaun et al., 2022) berpandangan bahwa, keterlibatan masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam keberhasilan pencapaian SDGs Desa. Komunitas yang secara aktif terlibat dalam berbagai tahapan pembangunan desa, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, akan membuat program desa menjadi lebih sesuai dan efisien. Akibatnya, Sangat penting bagi masyarakat untuk diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan informasi resmi yang didapat terkait dengan pencapaian indikator SDGs desa dari Sistem Informasi Kemendesa PDTT, Desa Pecangaan Kulon meraih skor SDGs sebanyak 41,67 yang menandakan bahwa pencapaian SDGs desa masih termasuk dalam kategori rendah-menengah. Guna memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi ini, dibawah ini disajikan grafik pencapaian SDGs Desa yang merefleksikan tingkat pencapaian setiap indikator pembangunan desa:



Gambar 1.1 Capaian Indikator SDGs Desa Pecangaan Kulon

Tahun 2026

Sumber : <https://sid.kemendesa.go.id/sdgs>

Dari informasi yang ada tersebut, terlihat bahwa pencapaian target SDGs di Desa Pecangaan Kulon tidak seimbang antar berbagai sasaran SDGs. Beberapa target menunjukkan nilai yang sangat tinggi, misalnya desa yang bersih dan terbarukan mencapai angka (99,79), kesetaraan gender di (94,67), dan desa yang damai serta berkeadilan di (85,20). Namun, di sisi lain terdapat beberapa target yang sangat rendah hingga mencapai nol, seperti SDGs 12 yang berkaitan dengan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, SDGs 13 mengenai desa yang peka terhadap perubahan iklim, SDGs 14 tentang kepedulian terhadap lingkungan laut, serta SDGs 15 yang berhubungan dengan kepedulian terhadap lingkungan darat. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan masih belum diprioritaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Rendahnya pencapaian pada indikator-indikator tersebut mencerminkan masih kurangnya kesadaran, kebijakan, serta program yang berfokus ke perlindungan lingkungan, pengelolaan SDA berkelanjutan, serta upaya mengurangi dan mengadaptasi dampak perubahan iklim di tingkat desa.

Selain itu, indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi desa yang mencapai (34,55), desa yang sehat dan sejahtera sebesar (44,94), infrastruktur dan inovasi desa yang menunjukkan angka (58,33), serta desa yang bebas dari kesenjangan dengan nilai (48,29) masih termasuk dalam kategori rendah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Pecangaan Kulon belum sepenuhnya merata dan belum terpenuhi dengan baik. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam pelaksanaan pembangunan desa, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan program, maupun distribusi manfaat pembangunan yang dirasakan oleh

masyarakat. Maka dari itu, sangat penting teruntuk semua pihak yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan desa untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kualitas pengelolaan pembangunan desa demi mendorong peningkatan pencapaian tujuan SDGs desa.

Berbagai studi sebelumnya juga telah banyak yang menganalisis elemen-elemen yang berpengaruh terhadap realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa dan memperlihatkan temuan penelitian yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Arianto, Komang Sumadi, dan Andayani (2024) dengan temuan bahwa sensitivitas moral berdampak positif terhadap pencapaian SDGs di tingkat desa, tidak sejalan dengan studi yang telah dilakukan Aulia, Syamsuddin, dan sahrir (2023) dengan hasil *moral sensitivity* tidak berpengaruh terhadap pencapaian SDGs Desa.

Kajian yang dilakukan oleh Aulia, Syamsuddin, dan juga sahrir (2023) menunjukkan bahwasannya transparansi mempunyai dampak besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa. Penelitian yang dilakukan Handayani, Dedi, Hidayah, dan Suryanto (2025) tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kosat, Marlon Re, dan Mudamakin (2025), bahwasannya transparansi tidak berpengaruh signifikan pada pencapaian SDGs desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Annahar, Widianingsih, Muhtar, Paskarina (2023) menemukan bahwasannya partisipasi masyarakat mempengaruhi signifikan pencapaian SDGs desa.

Sebagian besar penelitian sebelumnya belum banyak yang membahas bersama ketiga variabel tersebut yaitu *moral sensitivity*, transparansi, serta

partisipasi masyarakat guna mencapai SDGs desa pada lingkungan tertentu. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada satu atau dua hal terkait pengelolaan desa. Sehingga, perbedaan penelitian yang sudah ada dengan studi ini terletak pada pendekatan penelitian ketiga variabel tersebut, serta pemilihan objek dan waktu penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini fokus pada masyarakat Desa Pecangaan Kulon karena merekalah yang merasakan langsung dampak dari kebijakan dan program pembangunan desa, termasuk implementasi SDGs Desa. Pandangan masyarakat dipandang penting untuk melihat seberapa baik kesadaran moral para pemimpin desa, keterbukaan pemerintah desa, dan keterlibatan masyarakat dalam membantu mencapai tujuan SDGs desa. Lokasi penelitian ini dipilih karena Desa Pecangaan Kulon menunjukkan adanya ketidakseimbangan indikator SDG berdasarkan data empiris. Meskipun indikator SDG Desa sudah banyak yang mencapai level tinggi, namun ada pula yang masih berada pada level rendah. Keadaan ini menunjukkan bahwa pembangunan desa di Desa Pecangaan Kulon belum sepenuhnya seimbang atau efektif, sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, peneliti ingin melihat lebih dekat berbagai faktor yang mempengaruhi seberapa baik desa mencapai SDGs. Untuk itu, peneliti memutuskan guna melakukan studi dengan judul **“Pengaruh Sensitivitas Moral, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs): Studi Kasus di Desa Pecangaan Kulon Kabupaten Jepara.”**

Studi ini diharapkan dapat memberi wawasan praktis dan juga menjadi panduan untuk pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan keterlibatan masyarakat, membantu mereka mencapai target SDG desa dengan lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, berikut perumusan masalah dalam studi ini:

1. Apakah moral *sensitivity* berpengaruh terhadap pencapaian SDGs Desa Pecangaan Kulon?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pencapaian SDGs Pecangaan Kulon?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencapaian SDGs Desa Pecangaan Kulon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar dari uraian rumusan masalah yang sudah dirumuskan secara jelas dan runtut, untuk itu tujuan studi ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji serta membuktikan pengaruh moral *sensitivity* aparatur desa terhadap pencapaian SDGs Desa Pecangaan Kulon
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh transparansi tata kelola pemerintahan desa terhadap pencapaian SDGs Desa Pecangaan Kulon.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pencapaian SDGs Desa Pecangaan Kulon.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoretis

Harapannya studi ini akan membantu kemajuan penelitian, terutama dalam bidang akuntansi untuk sektor publik dan manajemen pemerintahan desa. Temuan dari studi ini diharapkan digunakan sebagai acuan mengenai pengaruh sensitivitas moral, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat terhadap pencapaian tujuan SDGs di desa, sehingga dapat memperkaya khazanah literatur yang berhubungan dengan pembangunan desa yang berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat praktis

Studi ini harapannya bisa memberikan kontribusi praktis dengan memberikan saran kepada pemerintah desa untuk meningkatkan integritas aparatur, keterbukaan dalam pengelolaan, serta efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan keterlibatan aktif mereka dalam tahapan perencanaan hingga evaluasi program pembangunan. Disamping itu, temuan-temuan penelitian ini juga dapat membantu temuan-temuan dari studi ini juga menjadi referensi evaluasi untuk pemerintah daerah maupun kementerian desa PDTT saat merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna mendukung percepatan pencapaian SDGs desa.